

NAMA : CANDRA KIRANA  
KELAS : 15 POL A

**“Gerakan Non-Mainstream dan Partai Politik Di Indonesia”**

Judul Buku : **Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia**  
Penulis : Prof. Dr. Bilveer Singh, M.A, dan Dr. Zuly Qodir  
Penerbit : Pustaka Pelajar  
Ketebalan : 444+xiii halaman

Buku *Gerakan Islam Non Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia* yang ditulis oleh Bilveer Singh dan Zuly Qodir berdasarkan perspektif sosiologi politik. Buku ini menggunakan kajian lapangan, kajian literatur, wawancara dan diskusi terfokus sebagai cara untuk mendapatkan data.

Buku ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan penulis di Surakarta dengan mengambil kasus Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Selain itu, tentang politik Islam dikembangkan dari kajian lapangan ketika Pemilu 2014 berlangsung yang diikuti oleh dua kontestan peserta Pemilu Presiden yakni Prabowo-Hatta yang didukung oleh Partai PKS, PPP, PAN, Golkar, dan Gerindra. Sementara Jokowi-JK didukung oleh PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Pilpres 2014 bagi penulis merupakan pilpres yang paling ganas dalam hal isu black campaign dan isu lainnya seperti tentang nasionalisme, keagamaan dan perilaku politik massa. Tema radikalisme agama yang disebut sebagai gerakan *non mainstream* dalam hal Islam tentu bukan tema baru. Telah banyak yang menulis tentang tema ini. Namun demikian, penulis berfikir bahwa tema radikalisme tetap penting dan perlu dikembangkan terus-menerus oleh banyak orang atau penulis dari semua generasi.

Di awal abad ke-21 pasca runtuhnya Orde Baru, kesempatan politik semakin semakin terbuka yang dimotori oleh gerakan reformasi Indonesia. Hal

tersebut juga mendorong gerakan mobilisasi massa secara transparan dalam ruang publik. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam gerakan sosial secara masif di Indonesia. Perubahan iklim politik pada era reformasi tersebut, berpengaruh juga terhadap perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat dengan semakin menguatnya identitas dan gerakan kelompok keagamaan di luar *mainstream* kelompok keagamaan. Dalam perkembangan gerakan sosial keagamaan tersebut, terdapat tiga aspek yang menonjol, yaitu pertama, aspek yang didorong oleh aspek politis, kedua orientasi keagamaan yang kuat, dan ketiga orientasi kebangkitan kultural rakyat Indonesia. Adapun dalam pendekatannya, kaum agamawan dan gerakan keagamaan, menurut A.S. Hikam, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan “menegara” dan pendekatan “masyarakat”.

Pada akhir-akhir dekade ini, kehidupan beragama di Indonesia yang ditandai dengan semakin beragamnya paham keagamaan, sejumlah gerakan keagamaan baru bermunculan di luar tradisi agama yang *mainstream*, seperti Ahmadiyah, Komunitas Eden, atau juga praktik shalat dwibahasa Yusman roy, dan lain-lain. Dalam proses perkembangannya, terdapat beberapa varian gerakan keagamaan *mainstream* yang muncul dalam bentuk organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Wahdah Islamiyah (WI), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan sebagainya. Kemudian, ada pula yang muncul sebagai gerakan keagamaan *non-mainstream*, baik dalam bentuk gerakan perkumpulan terbatas maupun komunitas, seperti Al-Qiyadah Al Islamiyah, Quran Suci, dan Satrio Piningit. Ada pula yang muncul dalam gerakan individual seperti gerakan shalat dwibahasa, shalat bersiul (Sumardin), dan Gerakan Madi.

Dalam praktik kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, terdapat beberapa organisasi sosial keagamaan yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Dalam hal ini, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang besar peranannya dan memiliki jamaah dengan jumlah besar, serta menjadi ideologi paling berpengaruh saat ini. Selain organisasi tersebut, terdapat pula organisasi yang menghimpun tokoh agama dan ulama yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang ketiga ini sifatnya

struktural dan dibawah kendali negara. Ketiga organisasi tersebut dikategorikan sebagai Islam *mainstream* khususnya di Indonesia, sementara kelompok yang berbeda secara ideologi dan aktivitas keagamaan dikategorikan sebagai Islam *non-mainstream*. Islam *non-mainstream* adalah kelompok Islam, tetapi tidak sesuai praktik keIslaman yang populer atau berbeda ideologi dari ketiga organisasi sosial keagamaan (NU dan Muhammadiyah atau diluar ketentuan MUI). Bentuk gerakan politik kelompok non-mainstream dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu jihadis, reformis, dan rejeksionis. Jihadis adalah bentuk aksi politik berupa tindakan kekerasan atas nama jihad. Reformis adalah bentuk aksi politik berupa tekanan terhadap pemerintah tanpa melakukan kekerasan yang akan mengganggu stabilitas nasional dan menuntut hak-hak sektarion. Rejeksionis adalah bentuk aksi politik berupa penolakan terhadap sistem demokrasi dan melakukan tekanan-tekanan terhadap berbagai kebijakan.

Pokok dari bahasan buku ini adalah gerakan Islam non-mainstream yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). MTA adalah lembaga dakwah dalam bentuk yayasan yang didirikan oleh Ustadz Abdullah Thufail Saputra pada 19 September 1972, dan dikukuhkan dengan akta notaris R.Soegondo Notodisoerjo, nomor 23, tanggal 23 Januari 1974 di Surakarta. Beliau mendirikan dan memimpin MTA tahun 1972-1992. Sementara itu, lepas kepemimpinannya, kini MTA dipimpin oleh Ustadz Ahmad Sukina sejak 1992 hingga sekarang.

MTA melakukan kegiatan dakwahnya terutama dengan mengadakan pengajian rutin di tiap-tiap kantor cabang. MTA sebagai dakwah Islamiyah juga menyelenggarakan pendidikan formal TK-SMA. Ustadz Abdullah Thufail Saputra yakin bahwa umat Islam Indonesia hanya akan dapat melakukan emansipasi dan berkontribusi maksimal apabila umat Islam mau kembali ke Alquran. Kondisi demikianlah yang mendorong Ustadz Abdullah mendirikan MTA sebagai rintisan untuk mengajak umat Islam kembali ke Alquran yang dikatakan sebenarnya.

MTA oleh pendirinya didedikasikan sebagai gerakan purifikasi Islam yang bertujuan mengembalikan pengamalan Islam yang murni sambil mengikis setiap pengamalan Islam yang dianggap menyimpang dari Alquran dan Assunnah.

Sebagai gerakan Islam puritan (purifikasi), MTA juga pernah terlibat dalam gerakan sokong menyokong pada rezim politik tertentu terutama pada era Golkar, Orde Baru. MTA pernah secara resmi menjadi anggota Golkar. Ketua umum MTA pertama Abdullah Thufail saputra pernah menjadi Anggota Dewan Penasihat dan Pertimbangan Golkar Surakarta (1984-1992). Keterlibatan MTA dengan Golkar terbilang cukup lama yakni sejak 1978-1993. Namun belakangan MTA tidak secara resmi menjadi anggota Golkar karena urusan politik umat Islam yang tampaknya menyebar dalam berpolitik. MTA kemudian melakukan aktivitas politik yang menyebar juga, tidak resmi menjadi anggota Golkar, tetapi dekat dengan partai Islam seperti PPP, PBB dan PKS. Dan dibawah kepemimpinan Ahmad Sukino, warga MTA dilarang keras terlibat dalam partai politik. Sesuatu yang secara sosiologis dapat dipersoalkan lebih jauh sebab hal itu akan berhubungan dengan soal otoritas seseorang dihadapan jamaahnya. Hal ini dikarenakan partai politik kata Ahmad Sukino akan memecah belah warga MTA. Namun, jika harus berpolitik maka warga MTA harus menunggu komando dan satu komando dari imam pusat MTA tidak sendiri-sendiri, sebab hal itu berbahaya untuk perkembangan MTA sendiri dan umat Islam.

### **Suara Partai Islam pada Pemilu 2009**

Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama pasca reformasi diikuti tidak kurang dari 48 partai politik dengan segala macam atribut partai yang muncul dalam pemilu. Demokrasi yang dibuka sejak zaman BJ. Habibie sebagai presiden transisi, menggantikan posisi Soeharto yang mundur tanggal 20 Mei 1998, selama satu tahun benar-benar mampu mengubah wajah politik Indonesia. Perubahan iklim demokrasi di Indonesia membawa dampak yang demikian hebat sehingga dikalangan Islam politik pun kemudian menemukan momentum dimana setelah berpuluh-puluh tahun dilarang aktif dalam gerakan politik kemudian terjun dalam dunia politik praktis sebagai semacam jalan pergerakan dan perjuangan. Umat Islam yang berdarah politik tidak lagi canggung dan ketakutan untuk masuk dalam politik praktis, sebab stigma negatif Islam politik sebagai gerakan **ekstrem kanan** tidak muncul sekalipun gerakan-gerakan radikal secara sporadik kemudian bermunculan di Indonesia seperti di beberapa daerah yang dikenal dengan penuh

kerentanan konflik **komunal**. Wilayah Indonesia seperti Aceh, Ambon, Poso, dan Makassar adalah wilayah-wilayah yang kemudian selalu identik dengan areal radikalisme Agama di Indonesia.

Kita dapat menyaksikan perkembangan kebangkitan Islam Politik di Indonesia sejak akhir 1998-2004 seperti tumbuhnya kelompok-kelompok Islam kampus yang semula tiarap. Kelompok tarbiyah yang bergerak di kampus-kampus non Islam atau kampus umum/kampus sekuler seperti UI, IPB, ITB, ITS, Unair, Unbraw, Unhas, UGM, Undip kemudian bergerak dalam jamaah-jamaah Islam kampus secara masif. Kelompok tarbiyah tersebut kemudian mendirikan perkumpulan mahasiswa bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan cikal bakal muncul partai Keadilan (Partai Keadilan Sejahtera) yang kemudian ikut Pemilu tahun 1999 dengan nama partai Keadilan. Tetapi karena tidak lolos ambang batas perolehan suara dewan perwakilan rakyat secara nasional (*electoral threshold*) maka pada pemilu 2004 kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), demikian sampai Pemilu 2014 kemarin. Pada pemilu 1999 kita akan dapat menyaksikan bahwa di dalamnya terjadi pertarungan internal Islam politik yang berlatar belakang Muhammadiyah, NU, sampai yang berlatar belakang Islam modernis seperti kelompok masyumi dan konvensional NU di luar kelompok Abdurrahman Wahid. Disana kita dapat menemukan yang berlatar belakang Muhammadiyah sebagian besar dalam Partai Amanat Nasional, sebagian di Partai Bulan Bintang (PBB) dan Masyumi, serta Partai Keadilan. Sementara yang berlatar belakang NU dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nahdatul Ulama, Partai Persatuan Pembangunan, serta yang berlatar belakang Islam konvensional partai ada dalam tubuh partai syarikat Islam, Partai Kebangkitan Umat (PKU) sebagian besar berlatar belakang Himpunan Mahasiswa Islam. Dengan pertarungan yang keras seperti itu, jika PAN dan PKB dimasukkan menjadi partai Islam, maka suara Islam Politik memang sangat signifikan jika melihat Pemilu tahun 1955 yang mencapai 40%. Sedangkan Pemilu 1999 kekuatan Islam politik mencapai 43,32%. Sementara jika PAN dan PKB tidak dimasukkan menjadi kekuatan Islam politik maka partai Islam hanya mencapai 20% suara pemilih. Pada Pemilu tahun 2004

bukti keterlibatan politik kelompok Islam politik Indonesia yakni terdapat partai Islam yang memperoleh suara di Parlemen. Tetapi hal yang menarik adalah dalam tubuh umat Islam terdapat perpecahan yang terjadi seperti dalam tubuh Nahdlatul Ulama yakni PPP pecah dengan PBR pimpinan KH. Zainuddin MZ, juga perpecahan antara kubu Abdurrahman wahid dengan kubu KH. Syukron Makmun yang mendirikan PPNU yang semula adalah PNU.

Hal yang juga menarik adalah pada Pemilu 2009 kemunculan Islam Politik dalam bentuknya partai Islam, tampak sekali kembali membangun partai Islam sebagai kendaraan politik umat Islam untuk duduk di parlemen Indonesia. Beberapa partai baru berwajah Islam muncul seperti Partai Matahari Bangsa (PMB) sebagai partai politik berbasis Islam dengan massa pendukung utama warga Muhammadiyah yang bisa dikatakan sebagai lawan dari PAN yang didirikan terlebih dahulu oleh Amien Rais mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Selain itu, muncul pula partai dari kalangan NU yakni PPNU dan PKNU yang jelas-jelas merupakan rival dari PKB yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid, sebagai partai yang dianggap merepresentasikan NU Indonesia.

Kita dapat menyaksikan bagaimana ketidakberhasilan partai-partai Islam atau Islam politik pada pemilu 2009 yang diikuti oleh tujuh partai politik berasaskan Islam, namun perolehan suaranya menurun drastis ketimbang pada Pemilu 2004 yang diikuti oleh lima partai berasaskan Islam sebab wakil dari NU baik PBR maupun PNU ternyata tidak lolos kembali. Di luar PAN dan PKB partai Islam hanya mendapatkan suara 18% suara parlemen, menurun ketimbang pada Pemilu 2004.

Memperhatikan perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 2009 yang lalu sebenarnya dapat dikatakan bahwa partai berbasis agama (sektarian) tidak laku, namun tetap akan berpartisipasi pada setiap pemilu sebab mereka memiliki agenda dan argumen yang cukup mapan bahwa berpolitik dalam Islam merupakan bagian dari dakwah Islam, selain melanggengkan ideologi keIslaman yang dipahami sejak zaman kekhalifahan bahkan sejak zaman kenabian Muhammad saw yang dipahami sebagai pemimpin religius sekaligus pemimpin

politik (pemimpin negara). Oleh sebab itu antara pemikiran ke-Islaman menjadi bagian yang menyatu yang tidak bisa dipisahkan, sekalipun memang benar dapat dibedakan.

Memperhatikan perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu pasca reformasi, dari 1999 sampai 2009, dapat dikatakan Islam politik Indonesia terpuruk. Keterpurukan tersebut disebabkan karena beberapa penyebab antara lain, *pertama* Partai Islam dalam kinerjanya ternyata tidak menunjukkan perbedaan dengan partai yang tidak Islam. Lambat dan tidak responsif terhadap masalah umat, seperti kemiskinan dan kebodohan. *Kedua*, perilaku politiknya ternyata juga terjerat kasus-kasus korupsi yang menghaabiskan uang negara, dan tidak memiliki kesantunan politik yang menunjukkan adanya keadaban politik era reformasi, sebab diantara mereka juga selalu terlibat konflik kepentingan sehingga selalu ingin mendirikan partai baru jika berkonflik.

#### **Suara Partai Islam pada Pemilu 2014**

Perolehan suara parlemen pada Pemilu 2014 di antara partai Islam dan partai Nasionalis, dimana partai Islam diwakili PPP, PKS, dan PBB ditambah partai berasaskan Pancasila tetapi basis utama pendukung adalah Muhammadiyah yakni PAN dan diwakili NU yakni Partai Kebangkitan Bangsa. PPP memperoleh 6,53%, PKS memperoleh 6,79%, PBB memperoleh 1,46%, PAN memperoleh 7,59% dan PKB memperoleh 9,04%.

Setelah selesai Pemilu 2014 yang tidak menghasilkan suara mayoritas tunggal, gagasan tentang koalisi pun kemudian menjadi keharusan untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. PDIP sebagai pemenang pemilu kemudian berkoalisi dengan Nasdem, dan PKB yang *notebene* berlatar belakang NU. Sementara Gerindra sebagai pemenang ketiga kemudian berkoalisi dengan PAN, PPP, dan PKS. PPP dibawah pimpinan Suryadharma Ali sejak awal sudah menunjukkan hendak bergabung dengan Gerindra. Bahkan Golkar yang dikenal sebagai partai moderat atau Islam Moderat yang berkultur HMI akhirnya pada hari terakhir juga merapat dengan Gerindra, sekalipun sebagian yang lain mendukung Jusuf Kalla merapat dengan PDIP, oleh sebab itu, elit Golkar terbelah

suaranya sebagian mendukung Abu Rizal Bakrie di Gerindra sementara lainnya mendukung Jokowi dari PDIP.

Dengan kondisi seperti itu, maka gagasan koalisi Partai Islam mengusung calonnya sendiri gagal ditengah jalan. Koalisi Poros Tengah Jilid II gagal sebelum matang. Gagasan M. Din Syamsuddin, Makruf Amin, dan MS Ka'ban tidak mendapatkan respons positif dari para elit politik muslim. Dengan begitu maka berakhirlah partai Islam untuk mencalonkan sendiri pasangan Capres dan Cawapresnya, sekalipun mendapatkan suara 31% jika PAN, PKB, PPP, PKS, dan PBB bergabung.

Setelah gagal mengusung koalisi partai Islam, Din Syamsuddin sebagai ketua umum Muhammadiyah kemudian mengeluarkan maklumat bahwa Muhammadiyah tidak mendukung salah satu partai politik pun dalam Pilpres 9 Juli 2014. Sikap politik Muhammadiyah jelas akan berpengaruh secara politik pada pemilu presiden Indonesia. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dengan perolehan suara 52,15% dan Prabowo-Hatta 46,85 %.

Ada beberapa alasan mengapa partai Islam di Indonesia tetap bertahan sekalipun agak sulit dikatakan kuat. Beberapa alasan tersebut adalah alasan teologis yang menyatakan bahwa antara ibadah (syari'at dengan politik) tidak bisa dipisahkan hanya bisa dipilah, dibedakan. Alasan lainnya adalah *pertama*, sebagai wadah elit politik muslim untuk menyalurkan aspirasi politiknya yang telah berpuluh tahun dibungkam oleh rezim politik Orde Baru. *Kedua*, memindahkan rumah para cendekiawan Muslim Indonesia dan cendekiawan abangan. Jika semua cendekiawan muslim sedikit malu-malu atau tidak secara terang-terangan bermain politik di bawah rezim Orde Baru, maka sejak reformasi 1998, para cendekiawan muslim dan abangan terjun langsung dalam partai yang didirikan oleh mereka sendiri. *Ketiga*, rumah para aktivis Islam politik dan gerakan Islam Kampus. *Keempat*, memindahkan rumah artikulasi politisi Islam yang semula aktif dalam partai religius hasil fusi yakni PPP, dan Golkar.

Selain faktor internal diatas, munculnya dan terus bertahannya partai Islam atau gerakan Islam politik karena faktor luar Islam Indonesia. Diantara faktor



tersebut adalah kemenangan partai-partai berbasis Islam dikawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kemenangan PAS di Aljazair, kemenangan IM di Mesir, kemenangan Partai Baats di Irak, kemenangan Ahmadinejad di Iran, kemenangan Partai Islam Maroko, Sudan dan kemenangna Partai Islam Serantau (PIS) di Malaysia telah mendorong keyakinan aktivis partai Islam untuk terus mendorong berdiri dan berkembangnya partai Islam di Indonesia. Bahkan, *Arab Spring* yang dimulai dari Mesir dan beberapa negara Afrika tidak menyurutkan semangat sebagian politisi muslim dan aktivis Islam politik untuk terus membangun kembali kekuatan Islam politik di Indonesia sebagaimana tahun 1955 era Masyumi.